



FOKUS

JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANDUNG

Edisi Perdana, Mei 1999

Kesiapan Pendidikan Tinggi Dalam Menghadapi Perubahan
Tuntutan Masyarakat Terhadap Profesi Akuntansi Dalam
Reformasi Pendidikan Akuntansi
Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K. M.S., Ak.

Pendekatan Model Sistem Produksi Dan Relevansi
Konsepnya Dalam Perencanaan Pengelolaan Jurusan
Sunardi S. Brahmana, S.E., M.T.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Mahasiswa Melalui
Belajar Efektif Di Perguruan Tinggi
Elisabeth Koes Soedijati, Dra., M.Si.

Sudah Siapkah Bisnis Anda
Menghadapi Anjloknya Rupiah?
Nugroho J.S., S.E., M.M. & Lasmanah, S.E.

Translasi Mata Uang Asing
(*Foreign Currency Translation*)
Diana Sari, S.E.

Strategi Dalam *Time Based Competition*:
Penerapan Konsep *Just-In-Time*
Salim Munabi S.E., M.M.

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS WIDYATAMA

Unit Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung

KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP PROFESI AKUNTANSI DALAM REFORMASI PENDIDIKAN AKUNTANSI

Prof.Dr.Hj.Koesbandijah A.K., Ak., M.S.¹



PENDAHULUAN

Pembangunan yang secara terus menerus digalakkan sesuai dengan GBHN 1986 dan 1993 sekonyong-konyong terhenti karena terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Walaupun demikian adanya, kewajiban perusahaan-perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan pada akhir tahun tidak berpengaruh, yang menjadi masalah berkaitan dengan penyelesaian laporan keuangan adalah dampak krisis moneter terhadap selisih kurs US \$ dengan rupiah, bagi mereka yang tersangkut utang piutang dalam dollar (uang asing). Dengan turunnya nilai rupiah terhadap US \$ tidak sedikit perusahaan yang mengalami defisit bahkan sudah tidak memiliki titik terang untuk melangsungkan usahanya dalam tahun-tahun mendatang. Pihak pemerintah dan Ikatan Profesi Akuntansi (Ikatan Akuntan Indonesia - IAI) dengan terjadinya lonjakan selisih kurs bersama-sama menyusun Standar Akuntansi Keuangan agar terjadi keseragaman dalam penanganan masalah tersebut.

Berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan yang merupakan landasan bagi pernyataan pendapat akuntan independen yang bersih (*clean opinion*), manajemen perusahaan harus dapat menunjukkan kiatnya dalam menanggulangi krisis moneter, bahwa perusahaannya dapat tetap *survive*. Semua kebijaksanaan yang relevan dan dapat direalisasi secara nyata harus dicantumkan baik pada laporan akuntan independen maupun dalam catatan laporan keuangannya.

Dengan demikian akuntan harus selalu peka terhadap perubahan-perubahan dan dapat mencari solusi (jalan keluar) dalam menangani setiap perubahan ekonomi. Sudahkah siap

pendidikan akuntan Indonesia dalam mengantisipasi macam-macam perubahan dengan pendidikan yang mantap?

Sebelum terjadi krisis moneter laporan keuangan *audited* juga mengalami kritik masyarakat. Walaupun penyimpangan (tidak disengaja tetapi karena lalai) hanya sekali kali terjadi, masyarakat langsung beranggapan bahwa laporan keuangan *audited* tidak dapat dipercaya. Lebih-lebih dengan semaraknya praktik-praktik KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) masyarakat sudah *"a priori"* terhadap laporan keuangan.

Oleh karena itu laporan keuangan harus dapat mengungkap secara jelas dan transparan dalam catatan tambahannya, khususnya terhadap hal-hal yang peka bagi masyarakat, sehingga mereka tidak dapat mengandai-andai lagi.

Hal tersebut sudah tidak berkaitan dengan akuntansi keuangan lagi, tetapi akuntansi manajemen.

Akan tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa penyimpangan telah dilakukan oleh manajemen tertentu, karena laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan yang terkait. Sesuai hasil penelitian (Koesbandijah, 1996) penyimpangan yang disengaja kemungkinan besar dilaksanakan berdasarkan keinginan manajemen yang dilaksanakan oleh bawahannya (karyawannya).

"Memoret", buletin kantor Akuntan *Moret Ernst & Young* (Belanda) mengemukakan, bahwa berdasarkan penelitiannya *Ernst & Young* (1998) mengenai "fraud" (kecurangan atau penggelapan) di tiap perusahaan di seluruh dunia di mana pun dalam sektor apa pun terjadi *fraud*. Pada umumnya, pelakunya adalah anggota personel perusahaan

¹ Pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung, kini menjabat Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama

bersangkutan; dan mereka adalah orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman dan pimpinan organisasi di mana mereka bekerja.

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas berarti, bahwa lulusan pendidikan akuntansi diharapkan adalah orang-orang yang independen dan berintegritas, siap menghadapi dunia nyata yang tidak sesederhana yang dibayangkan. Penulis yang mengamati pendidikan akuntan yang sedang berlangsung masih melihat adanya pengajar yang tidak mempersiapkan mahasiswanya menghadapi dunia nyata. Masih ada yang beranggapan bahwa mengajar adalah cukup membacakan atau menjelaskan apa yang tercantum dalam *textbook*.

Lebih-lebih karena tidak dibiasakan berkomunikasi dua arah, melakukan presentasi di depan kelas, dilakukan *quiz*, membuat *reading assignment*, mahasiswa tidak termotivasi untuk giat belajar; membentuk kelompok untuk kegiatan interpersonal, juga sangat perlu.

Sebaiknya mengetahui perkembangan yang telah terjadi di bidang pendidikan akuntansi dan mendeteksi perubahan apa yang diperlukan.

Memang reformasi juga harus dilakukan di bidang pendidikan menghadapi milenium ke tiga ini agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat pemakai jasa akuntan yang mengglobal.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI DI INDONESIA

Dari semua profesi yang pemakaian gelarnya diatur oleh undang-undang adalah profesi akuntansi, yaitu Undang-undang Nomor 34 tahun 1954 yang mengatur pemakaian gelar akuntan. Tindakan ini diambil Pemerintah karena pada waktu itu lulusan kursus-kursus tata buku (Bond A, Bond B, dan MBA (Moderne Berdrijf Administratie)) menamakan diri akuntan dan membuka praktik kantor akuntan. Dengan demikian hanya lulusan fakultas ekonomi negeri dan setaranya sesuai dengan kriteria menurut undang-undang yang dapat menyandang gelar akuntan.

Sejak tahun 50-an sampai kini telah diselenggarakan pendidikan akuntansi strata S1 dan D3 oleh negeri maupun swasta. Dan beberapa tahun terakhir beberapa Universitas Negeri telah menyelenggarakan program S2 dan S3. Sesuai dengan Undang-undang No. 34

tahun 1954 hanya lulusan UI, UGM, Unpad, dan lain-lainnya mendapat langsung **pengakuan** dari Departemen Keuangan, sehingga langsung memperoleh register negara dan **sebutan** akuntan dan memang masih terdapat Universitas Negeri yang lulusannya belum dapat langsung menyandang gelar akuntan, yaitu UNILA dan UNLAM, dan juga seluruh lulusan PTS. Mereka diharuskan lulus Ujian Negara Akuntansi (UNA) agar dapat memperoleh register akuntan.

Ditinjau dari sudut kurikulum yang harus ditempuh, konsorsium Ilmu Ekonomi telah menetapkan kurikulum minimal bagi Jurusan Akuntansi yang sampai sekarang dipakai baik oleh PTN maupun PTS. Kurikulum tersebut memang dirancang untuk menghasilkan akuntan, namun hanya lulusan PTN saja (sebagian besar) yang langsung bergelar akuntan. Oleh karena itu lulusan PTS merasa dibedakan apabila mereka menginginkan register akuntan harus menempuh UNA dulu. Walaupun demikian, bagi yang langsung memasuki dunia kerja setelah lulus program S1 dan bersedia bekerja keras secara tekun dan ulet mengikuti perkembangan dunia akuntansi, dapat memperoleh kedudukan yang baik dan sukses.

Dengan demikian program pendidikan akuntansi yang berlaku di Indonesia menyatukan dua macam pendidikan, yaitu pendidikan Sarjana Akuntansi dan Pendidikan Akuntan (PTN) yang merupakan pendidikan profesi untuk menyiapkan lulusan memasuki profesi akuntansi

KURIKULUM PENDIDIKAN AKUNTANSI

SK Nomor 036/U/1993 Depdikbud menetapkan batasan satuan kredit semester (sks) bagi kurikulum program S1 akuntansi sebanyak 144 - 160 sks. Sesuai dengan SK 0313/U/1994 susunan kurikulum minimal Program S1 Akuntansi yang berlaku nasional adalah sebagai berikut :

a. Mata Kuliah Umum (MKU)	10 sks
b. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK)	53 sks
c. Mata Kuliah Keahlian (MKK)	57 sks
J u m l a h	120 sks

Dengan demikian untuk mencapai kurikulum minimal masih terdapat 24 sks untuk mata kuliah pilihan. Ditinjau dari sudut mata

kuliah wajib dan pilihan dapat dihitung persentasenya, yaitu 83,3 % untuk wajib dan 16,7 % untuk pilihan. Secara maksimal dapat diberlakukan sebanyak 160 sks sehingga secara proporsional adalah wajib 76,7 % dan pilihan 23,3 %.

Sesuai hasil rapat-rapat ketua-ketua Jurusan Akuntansi PTN dan PTS, para pakar akuntansi, Pengurus Pusat IAI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Panitia UNA dan USAP, serta Departemen Keuangan, menurut Dr. Zaki Baridwan, Ak., disepakati untuk membatasi pendidikan sarjana akuntansi pada jumlah minimum sks yang diijinkan, yaitu 144 sks. Dengan demikian kurikulum baru yang memisahkan dua jalur pendidikan itu tidak akan jauh berbeda jumlah sks-nya dibanding dengan kurikulum pendidikan akuntansi yang berlaku saat ini. Pendidikan S1 akuntansi yang terpisah dari pendidikan profesi memungkinkan terpenuhinya :

- 1) Penyiapan sarjana akuntansi yang menjadi dasar bagi pendidikan lanjutan profesi maupun pendidikan S2 dan S3.
- 2) Kecukupan fleksibilitas dalam mata kuliah pilihan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan.

PENYUSUNAN KEMBALI KURIKULUM PENDIDIKAN AKUNTANSI

Untuk mencapai tujuan yang telah diuraikan di atas, kurikulum pendidikan akuntansi yang diatur dalam SK No. 0313/U/1994 perlu disusun kembali. Pengurangan mata kuliah wajib dapat dilakukan melalui :

1. mengurangi mata kuliah wajib yang tidak terlalu perlu bagi pendidikan akuntansi dan memindahkannya ke mata kuliah pilihan (MKP)
2. memindahkan mata kuliah profesi ke kurikulum program pendidikan profesi.

Usulan kurikulum pendidikan akuntansi yang baru dapat dibuat sebagai berikut :

1. Pendidikan Sarjana dengan kurikulum sebanyak 144 sks yang terdiri dari :

MKU	10 sks
MKDKU	25 sks
MKDKA	15 sks
MKK	51 sks
Jumlah wajib	101 sks
MKP	43 sks
Jumlah Total	144 sks

Dengan demikian proporsi sks mata kuliah pilihan dibanding total sks adalah sebesar 30 % lebih tinggi dari proporsi mata kuliah pilihan dalam kurikulum nasional 1994. Jadi, fleksibilitas kurikulum ini adalah lebih baik dibanding dengan kurikulum nasional 1994.

2. Pendidikan profesi dengan kurikulum minimal sebanyak 20 sks. Kelebihannya diserahkan kepada tiap lembaga penyelenggara untuk memberikan tekanan sesuai dengan persepsi masing-masing. Dengan demikian jelaslah, bahwa pendidikan profesi adalah kelanjutan dari program Studi Akuntansi dalam Program Sarjana Ilmu Ekonomi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 dan SK Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1993, lulusan Program Pendidikan Profesi Akuntansi berhak menyanggah gelar *Akuntan*.

Isi (content) program Pendidikan Profesi Akuntansi yang minimal sebesar 20 (dua puluh) sks dan paling banyak 40 (empat puluh) sks dapat ditempuh dalam dua tahun atau 4 (empat) semester, kurang lebih adalah sesuai dengan yang diusulkan sebagai berikut :

1. Etika Bisnis dan Profesi
2. Seminar Perpajakan
3. Praktik Audit
4. Lingkungan Bisnis
5. Pengetahuan Pasar Modal dan Sekuritas
6. Seminar Akuntansi Keuangan, dan
7. Seminar Akuntansi Manajemen.

Kemungkinan Pemerintah akan menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Ikatan Akuntan Indonesia agar semua dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan Profesi Akuntansi Indonesia.

SERTIFIKASI AKUNTAN PUBLIK

Bagi lulusan pendidikan profesi yang menginginkan profesi akuntan publik dapat menempuh Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENGHADAPAI PERUBAHAN TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP PROFESI AKUNTANSI DALAM REFORMASI PENDIDIKAN AKUNTANSI.

Apabila usul-usul penataan pendidikan profesi akuntansi telah disetujui dan diberlakukan, apakah dengan sendirinya akan diperoleh kelulusan yang betul-betul profesional? Penulis yakin itu dapat terjadi apabila semua persyaratan untuk memperolehnya dipenuhi. Misalnya persyaratan yang menyangkut:

1. Tenaga pengajar harus memenuhi kualifikasi tertentu untuk dapat membina mata kuliah tertentu.
2. Tenaga Pengajar harus dapat mentransfer keahlian kumulatif kepada para mahasiswa.
3. Proses belajar mengajar harus efektif
4. *Character Building* (mengingat selama ± 30 tahun telah diabaikan, sehingga kebanyakan telah melupakan budi pekerti, etika, dan lain-lain yang menyangkut pembentukan karakter seseorang), agar dapat menghasilkan akuntan yang memiliki integritas yang tinggi, bermental, dan bermoral tinggi.
5. Mahasiswa harus memenuhi prasyarat kesertaan di mata kuliah tertentu.
6. Mahasiswa harus termotivasi sehingga mereka mau berkomunikasi dan meningkatkan interaksi baik di dalam maupun di luar kelas dengan membentuk kelompok belajar.

Jika melakukan *flash back*, apa yang penulis kemukakan di atas merupakan suatu perubahan dari metode lama (tradisional) ke metode baru. Penulis yakin, bahwa di antara para pengajar pendidik sudah sejak lama menerapkan apa

yang harus dilaksanakan sesuai dengan profesinya; sayangnya tidak semua berbuat yang sama dengan alasan efisiensi atau memang karena tidak tahu tugas seorang pendidik pengajar.

Berkaitan dengan globalisasi khususnya di bidang profesi akuntansi dan tuntutan dunia usaha beserta masyarakat yang sejak lama sudah merasa tidak puas terhadap laporan keuangan yang tidak informatif dan transparan penulis mengajak kepada semua rekan pendidik pengajar menanggapi keluhan masyarakat dan merubah kebiasaan lama menjadi motivator mahasiswanya dengan katauladanan yang positif dan proaktif. Hilangkan rasa *sense of self glory*, karena para akuntan masih diharuskan selalu mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan (PPL) yang diwajibkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Ikatan Profesi Akuntansi.

Dunia berputar, terus menerus berubah, begitu pula dunia usaha dan masyarakatnya, sehingga tak pernah merasa dirinya sudah sempurna bahkan harus terus bersikap proaktif. Oleh karena itu harus diusahakan mendekati mahasiswa ke dunia nyata dengan contoh-contoh dan klippping dari mass media dan jurnal.

Di bawah penulis mencantumkan metode tradisional dibandingkan dengan yang baru. Penulis mengharapkan semua lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Studi Akuntansi maupun program Pendidikan profesi Akuntansi membantu melakukan perubahan agar menghasilkan lulusan akuntan yang berintegritas, bermental, dan bermoral tinggi serta trampil dan meyakinkan dalam menjalankan profesinya.

Suatu perbandingan Pendekatan Tradisional dengan Pendekatan Baru dalam Pendidikan Akuntansi

Pendekatan tradisional	Pendekatan baru
1) Penekanan berat atas bidang teknis dalam akuntansi.	1) Penekanan lebih luas pada pendidikan umum dan pengetahuan bisnis serta organisasi.
2) Sedikit keterpaduan dalam topik permasalahan → bidang pelajaran akuntansi diajarkan secara terpisah.	2) Keterpaduan berat perpajakan, akuntansi manajerial, akuntansi keuangan, sistem, dan auditing.
3) Penekanan berat atas pembentukan satu jawaban yang benar.	3) Meningkatkan penekanan pada pemecahan masalah yang belum terstruktur, misalnya penggunaan kasus.
4) Penekanan berat atas kaidah pengajaran.	4) Meningkatkan penekanan pada proses belajar – belajar untuk belajar.
5) Penekanan berat atas pengajaran untuk ujian seragam CPA.	5) Pengenalan tujuan yang lebih luas.
6) Kurang perhatian terhadap kemampuan /keterampilan komunikasi dan antar-pribadi.	6) Meningkatkan penekanan di seluruh kurikulum akuntansi dalam kemampuan penulisan, presentasi, dan antar-pribadi (interpersonal).
7) Mahasiswa sebagai penerima pengetahuan yang pasif.	7) Mahasiswa sebagai peserta aktif dalam pelajaran.
8) Teknologi digunakan secara hemat dalam bidang pelajaran non-komputer.	8) Menggunakan teknologi yang dipadukan di seluruh kurikulum akuntansi.
9) Akuntansi pengantar berfokus kepada penyusunan laporan keuangan eksternal, penjurnalan, posting, dan lain-lain.	9) Akuntansi pengantar berfokus pada peranan akuntansi di dalam masyarakat dan organisasi perusahaan; meningkatkan fokus dalam penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan.

Sumber : DOYLE Z. WILLIAMS (1993).

PENUTUP

Tulisan ini disusun dengan harapan kita semua dapat menjalankan profesi akuntansi kita dengan baik dan ikhlas sebagai pengajar pendidik maupun dalam menjalankan praktik akuntan publik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Koesbandijah, 1996, *Sikap Para Manajer dan Karyawan Pelaksana Sistem Pengawasan Intern Perusahaan Terhadap Keandalan Informasi Keuangan*. Disertasi.
2. Moret Ernst & Young, 1998. *Fraude Binnen Bedrijven is Vaak Simpel te Plegen*.

Informatie Bulletin. 17 de Jaargang No. 11, December 1998. Rotterdam.

3. SK Nomor 0313/U/1994 . SK Mentri Pendidikan dan Kebudayaan .
4. SK Nomor 036/U/1993. SK Mentri Pendidikan dan Kebudayaan .
5. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 .
6. Williams, Doyle Z, 1993, *Reforming Accounting Education*, Journal of Accountancy, August 1993.
7. Zaki Baridwan, 1998, *Menyongsong Pendidikan Profesi Akuntansi*, Yogyakarta, UGM.